

Analisis Kemampuan dan Kinerja Keuangan Daerah di Kota Banjarmasin

Analysis of Capability and Financial Performance of The Region in Banjarmasin City

Anggi Putra Wiguna

Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
anggiputraw@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the condition and financial performance in the city of Banjarmasin as well as some efforts what has been made by the Government of Banjarmasin City to improve the ability and financial performance of the region.

Results from the study during the period 2011-2016. The annual growth rate of 21.34% has been successful in the process of local government, and it looks quite an enormous contribution of Local Revenue to the APBD is 14.12%. The degree of Fiscal Decentralization Banjarmasin during the period 2011-2016 is high, with an average of 14.12%, said the pattern of a relationship with infective. Meanwhile, the financial performance of Kota Banjarmasin from the side of fiscal needs is seen to increase during the period 2011-2016 average Rp. 313.493.023.747 billion means Fiscal Capacity greater than Fiscal Requirement. The average capacity of tax capacity is Rp. 344.725.786.194 or more. The fiscal position of Banjarmasin City, from the dimension of UPAD shows strong.

Keywords: *Financial Capability, Regional Finance, Financial Performance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengupas kondisi kemampuan dan kinerja keuangan di Kota Banjarmasin serta mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kinerja keuangan daerahnya.

Hasil dari penelitian selama periode 2011-2016 diketahui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah rata-rata pertahun 21,34%, sejauh ini telah berhasil dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah, terlihat cukup besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD yaitu 14,12%. Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Banjarmasin selama periode 2011-2016 tergolong tinggi dengan rata-rata 14,12%, artinya pola hubungan bersifat infeksi. Sementara itu, kinerja keuangan daerah Kota Banjarmasin dari sisi kebutuhan fiskal terlihat meningkat selama periode 2011-2016 rata-rata sebesar Rp. 313.493.023.747 milyar artinya Kapasitas Fiskal lebih besar dari Kebutuhan Fiskal. Posisi kapasitas fiskal rata-rata sebesar Rp. 344.725.786.194 milyar atau dikatakan cukup tinggi. Posisi fiskal Kota Banjarmasin, dari dimensi UPAD menunjukkan sudah kuat.

Kata Kunci : *Kemampuan Keuangan, Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan.*

PENDAHULUAN

➤ Latar Belakang

Kemampuan Daerah dan Kinerja Keuangan yaitu yang ukuran dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah menjalankan suatu otonomi daerah. Penilaian kinerja tersebut berbentuk rasio keuangan yang terdapat dari unsur Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Tabel 1
Rasio PAD terhadap APBD Kota Banjarmasin
Tahun 2011 – 2016

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi APBD (Rp)	Kontribusi PAD (%)
2011	118.554.981.542	883.218.552.334	13,42
2012	138.086.121.906	966.997.956.792	14,28
2013	167.313.762.016	1.253.358.346.700	13,35
2014	216.427.691.789	1.369.261.986.065	15,81
2015	226.660.182.755	1.469.417.928.111	15,43
2016	247.258.423.246	1.508.186.414.715	16,39
Rata – rata			14,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin (data diolah)

Dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan Kota Banjarmasin tergolong kurang dan dapat diketahui tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat relatif tidak terlalu tinggi dalam membiayai kegiatan pembangunan di era desentralisasi ini karena proporsinya antara 40,01% –50%. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana kemampuan keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal Kota Banjarmasin jika dilihat dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap struktur penerimaan APBD Kota Banjarmasin ? 2) Bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Banjarmasin jika dilihat dari kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya fiskal ? 3) upaya apa dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kemampuan dan memperbaiki kinerja keuangan daerah ? Tujuan Penelitian : 1) Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah serta derajat desentralisasi fiskal Kota Banjarmasin jika dilihat dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap struktur penerimaan APBD Kota Banjarmasin. 2) Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kota Banjarmasin jika dilihat dari kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya fiskal. 3) Untuk mengetahui upaya apa dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kemampuan dan memperbaiki kinerja keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

➤ Landasan Teori

Kemampuan keuangan daerah adalah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan APBD dikurangi belanja pegawai (UU No.23 Tahun 2014).

Secara singkat dapat diartikan desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, guna mendukung suatu tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan yang dilimpahkan kewenangan bidang pemerintahan (Saragih, 2003).

PAD adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu: memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2002)

Nilai tambah semua dari kegiatan ekonomi daerah dalam periode yang ditentukan (BPS Banjarmasin dalam angka).

Penelitian Terdahulu

1. Sijabat 2012 berjudul Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.
2. Endang Sri Mulatsih 2014 berjudul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebelum dan Setelah Pemekaran Daerah.
3. Mentari Yosephen Sijabat 2012 berjudul Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (studi pada dinas pendapatan daerah dan badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Malang tahun anggaran 2008-2012).
4. Cherrya Dhia Wenny 2012 berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Maria Regina Tobi 2016 berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur

METODE PENELITIAN

- **Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2011 - 2016

- **Jenis Penelitian**

Penelitian ini berjenis sekunder, karena penelitian ini bersumber dari literatur-literatur (kepuustakaan) serta data - data resmi yang berkaitan menggunakan data (*time series*) tahunan.

- **Definisi Operasional Variabel**

- Kemampuan Keuangan Daerah yaitu kemampuan Kota Banjarmasin untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diukur dari rasio antara PAD dengan APBD dinyatakan dalam persentase.
- Kinerja keuangan untuk melakukan penilaian kinerja dimasa lalu dengan diukur melalui Kebutuhan Fiskal(KF), Kapasitas Fiskal(KF), dan upaya fiskal.
- PAD adalah jumlah PAD Kota Banjarmasin yang teralisasi pada tahun anggaran 2011–2016, di mana hasil dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain–lain pendapatan yang sah.

- Fiskal daerah adalah realisasi jumlah seluruh sektor Pendapatan Daerah, yakni dari SiLPA, PAD, pendapatan pajak dan non pajak, serta sumbangan maupun bantuan (DAU dan DAK) dari pemerintah pusat.
- Kebutuhan Fiskal adalah rasio Celah Fiskal dan Kapasitas Fiskal yaitu dengan kebutuhan fiskal daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011-2016.
- Kapasitas Fiskal adalah sumber pendanaan daerah dari berasal PAD dan DBH data Tahun 2011-2016.
- Upaya Fiskal yaitu perubahan elastisitas PAD dengan perubahan PDRB.
- Penduduk yaitu untuk orang berdomisili suatu daerah selama 6 bulan/lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan bertujuan untuk menetap.
- Produk Domestik Regional Bruto sebagai jumlah nilai produk jasa dan barang akhir untuk menghasilkan berbagai unit produksi suatu daerah dalam jangka tertentu. PDRB atas dasar harga Kostan dari Tahun 2011-2016.
- **Metode Analisis Data**
 - **Kemampuan Keuangan Daerah**

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data Realisasi APBD :

$$KKD = PAD + DBH + DAU$$

Keterangan :

KKD : Kemampuan Keuangan Daerah
PAD : Pendapatan Asli Daerah
DBH : Dana Bagi Hasil
DAU : Dana Alokasi Umum

Kemampuan Keuangan bagi daerah kabupaten/kota di kelompokkan sebagai berikut:

 - a. Tinggi : di atas 550 milyar
 - b. Sedang : 300 – 550 milyar
 - c. Rendah : di bawah 300 milyar
 - **Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat Desentralisasi Fiskal pemerintah pusat atau daerah digunakan formulasi yaitu :

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal
PAD : Pendapatan Asli Daerah
TPD : Total Pendapatan Daerah
Ukuran DDF : 50%
 - **Kebutuhan Fiskal**

Untuk mengetahui cara tingkat kebutuhan fiskal dengan menentukan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kebutuhan Fiskal} = \text{Celah Fiskal} + \text{Kapasitas Fiskal}$$
 - **Kapasitas Fiskal**

Perhitungan Kapasitas Fiskal diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. Adapun rumusnya yaitu :

$$\text{Kapasitas Fiskal} = PAD + DBH$$

➤ **Upaya Fiskal**

Mengetahui posisi fiskal atau upaya fiskal dengan menghitung rasio perubahan PAD dengan perubahan PDRB.

$$e = \frac{\Delta PAD}{\Delta PDRB}$$

jika nilai elastisitas atau e semakin mendekati atau lebih dari 1 artinya semakin elatis suatu daerah PAD, maka struktur Pendapatan Asli Daerah akan baik atau kuat. Sebaliknya jika nilai e lebih kecil dari 1 artinya semakin inelastis, maka struktur tersebut semakin buruk atau lemah.

HASIL DAN ANALISIS

➤ **Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Desentralisasi Fiskal Kota Banjarmasin**

Tabel 2
Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2011 – 2016

Tahun	Pendapatan Umum (Rp)	Belanja Pegawai (Rp)	KKD (Rp)
2011	771.432.983.889	525.752.821.136	245.680.162.753
2012	854.626.345.957	599.575.615.686	255.050.730.271
2013	940.844.192.623	634.541.617.245	306.302.575.378
2014	1.038.797.584.121	716.383.579.312	322.414.004.809
2015	1.072.362.106.605	730.832.503.897	341.529.602.708
2016	1.155.160.201.808	745.179.135.248	409.981.066.560
Rata – rata	972.203.902.501	658.710.135.248	313.493.023.747

Sumber : Badan Pusat Statistik, Banjarmasin dalam angka (data diolah)

Kemampuan Keuangan Daerah dari perhitungan tahun ke tahun cukup bagus dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk rata-rata Kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp. 313.493.023.747 ini termasuk dalam kelompok sedang yaitu antara 300 s/d 550 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa Kemampuan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin sangat cukup bagus.

Tabel 3
Derajat Desentralisasi Fiskal
Kota Banjarmasin Tahun 2011-
2016

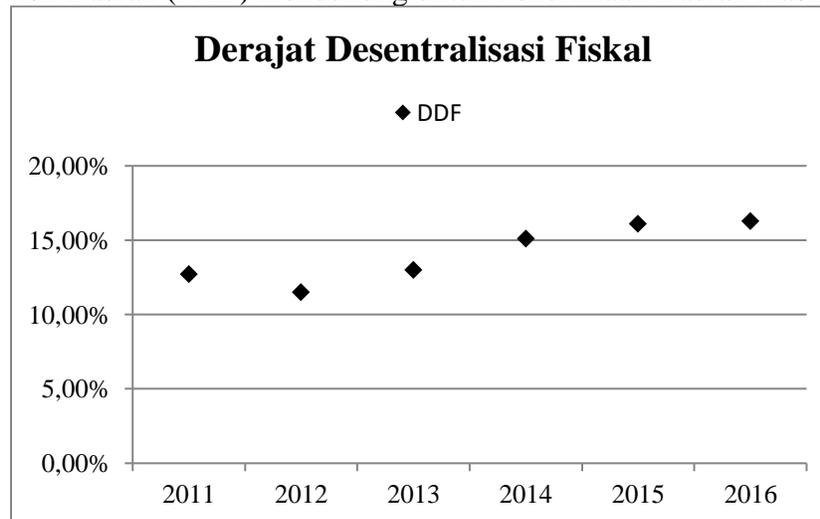
Tahun	(DDF) PAD/TPD (%)
2011	12,70
2012	11,52
2013	13,02
2014	15,11
2015	16,11
2016	16,27
Rata-rata	14,12

Sumber : Badan Pusat Statistik, Banjarmasin dalam angka (data diolah)

Menganalisa struktur realisasi pendapatan Kota Banjarmasin sebagaimana terlihat pada Tabel 3, maka diketahui kurangnya Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin. Tabel 3 menunjukkan mengalami penurunan dan peningkatan selama periode analisis, di mana pada tahun 2011 rasio sebesar 12,70% menurun menjadi 11,52% di tahun 2012, kemudian mengalami peningkatan menjadi 16,11% pada tahun 2016 dan rata-rata rasionya sebesar 16,27%, artinya selama periode 2011 sampai dengan 2016 Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Banjarmasin sangat kurang dan menunjukkan pola hubungan Infektif dengan keadaan keuangan yang sedang (masih tergantung dengan pemerintah pusat).

Mengacu pada kriteria yang diuraikan pada landasan teori, maka Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Banjarmasin tergolong rendah karena rata-ratanya sebesar 14,12%. Rendahnya Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Banjarmasin, antara lain disebabkan masih rendahnya kemampuan dan kewenangan dalam mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Visualisasi Gambar 1 dan perhitungan dalam Tabel 3 menunjukkan peranan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendukung untuk Penerimaan Daerah masih kurang.



Gambar 1

Derajat Desentralisasi Fiskal (Kemandirian Daerah)

Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin diharapkan mampu memperbaiki dan bahkan lebih meningkatkan lagi kemandirian dan keleluasan daerah (*local discretion*) dari perspektif keuangan daerah.

➤ **Analisis Kinerja Keuangan Daerah**

Tabel 4
Kebutuhan Fiskal Kota Banjarmasin
Tahun 2011-2016

Tahun	Celah Fiskal (Rp.)	Kapasitas Fiskal (Rp.)	Kebutuhan Fiskal (Rp.)
2011	-4.481.004.296	250.161.167.049	245.680.162.753
2012	-52.550.837.686	307.601.567.957	255.050.730.271
2013	-3.417.157.245	309.719.732.623	306.302.575.378
2014	-38.207.490.312	360.621.495.121	322.414.004.809

2015	-52.849.658.897	394.379.261.605	341.529.602.708
2016	-35.890.426.248	445.871.492.808	409.981.066.560
Rata-rata	-31.232.762.447	344.725.786.194	313.493.023.747

Sumber : Badan Pusat Statistik, Banjarmasin dalam angka (data diolah)

Mengacu hasil perhitungan pada Tabel 4 maka di ketahui bahwa kebutuhan fiskal dari tahun 2011-2016 mengalami peningkatan tiap tahunnya dan untuk rata-rata kebutuhan fiskal sebesar Rp. 313.493.023.747 ini menandakan bahwa kebutuhan fiskal lumayan baik.

Selama periode analisis, Kapasitas Fiskal lebih besar dari Kebutuhan Fiskal sehingga Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin diharapkan lebih meningkatkan lagi pada masalah kebutuhan fiskal. Untuk masalah Celah Fiskal Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin perlu melakukan manajemen pengeluaran daerah secara komprehensif, intergrate dengan selalu mengedepankan efektivitas dan efisiensi serta efek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi pada setiap rupiah.

Tabel 5
Kapasitas Fiskal Kota Banjarmasin Tahun 2011-2016

Tahun	PAD (Rp.)	DBH (Rp.)	KF (Rp.)
2011	118.554.981.542	131.606.185.507	250.161.167.049
2012	138.086.121.906	169.515.446.051	307.601.567.957
2013	167.313.762.016	142.405.970.607	309.719.732.623
2014	216.427.691.789	144.193.803.332	360.621.495.121
2015	226.660.182.755	167.719.078.850	394.379.261.605
2016	247.258.423.246	198.613.069.562	445.871.492.808
Rata-rata			344.725.786.194

Sumber : Badan Pusat Statistik, Banjarmasin dalam angka (data diolah)

Jika dilihat dari Kapasitas Fiskal, maka posisi Kapasitas Fiskal Kota Banjarmasin periode 2011-2016 termasuk cukup tinggi, yang ditunjukkan dengan besarnya kapasitas fiskal rata-rata sebesar Rp. 344.725786.194. Artinya Kota Banjarmasin dengan kinerja keuangan daerahnya dilihat dari tingkat kapasitas fiskalnya di kategorikan sangat mampu menjalankan Desentralisasi Fiskal.

Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah, Kemampuan Fiskal Daerah yang merupakan salah satu tolak ukur pelaksanaan Desentralisasi harus benar-benar mendapat perhatian yang serius. Untuk Pemerintah Daerah dipacu lebih meningkatkan lagi kemampuan fiskalnya seoptimal mungkin, terutama dalam membiayai atau membelanjai urusan rumah tangganya sendiri yaitu dengan cara menggali dan menggunakan secara baik dan benar untuk sumber dana yang potensial yang ada di daerah.

Berdasarkan Tabel 6 di bawah ini, maka dapat di ketahui bahwa selama tahun 2011 sampai dengan 2016, UPAD Kota Banjarmasin rata-rata sebesar 1,5 artinya lebih dari 1. Hal ini menunjukkan sudah kuatnya upaya pengumpulan pajak yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.

Tabel 6
Upaya Pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (UPAD)
Kota Banjarmasin Tahun 2011-2016

Tahun	Δ PAD	Δ PDRB	UPAD (%)
2011	38.044.333.572	1.463.956.000.000	2,6
2012	19.531.140.364	1.646.178.000.000	1,2
2013	29.227.640.110	1.753.212.000.000	1,7
2014	49.113.929.773	2.489.671.000.000	2,0
2015	10.232.490.966	2.617.133.000.000	0,4
2016	20.598.240.491	2.289.233.000.000	0,9
Rata-rata			1,5

Sumber : Badan Pusat Statistik, Banjarmasin dalam angka (data diolah)

Posisi Fiskal Kota Banjarmasin selama Tahun 2011 hingga tahun 2016 dilihat nilai dari UPAD masih tergolong tinggi, hal ini antara lain disebabkan sudah mulai optimalnya pengelolaan sumber PAD seperti pajak dan terutama Retribusi Daerah, sistem pengendalian yang masih tidak mampu, sedangkan sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya seperti Laba BUMD juga belum optimal karena pada tahun 2011 sampai dengan 2016 menunjukkan kontribusi yang kecil bahkan dari tahun ke tahun mengalami naik turun terhadap PAD.

Sejalan dengan uraian di atas maka perlu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin tetap meningkatkan serta memperbaiki sistem pengumpulan pajak daerah terutama retribusi daerah antara lain : a). Metode menghitung potensi PAD yang efektif, b). Pelaporan hasil pengumpulan PAD selaku teratur perlu dimonitor serta dibandingkan dengan target dan potensi.

➤ **Upaya-upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Meningkatkan Kemampuan serta Kinerja Keuangan Daerah**

Dalam rangka menaikkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan upaya-upaya yang cukup maksimal di antaranya dengan membuat berbagai sasaran, kebijakan, dan program yang antara lain sebagai berikut :

Sasaran :

1. Teridentifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah
2. Tersedianya analisis kelayakan penggalan Pendapatan Asli Daerah
3. Tersedianya sarana dan prasaranan pelayanan
4. Tersedianya SDM yang berkualitas
5. Terwujudnya sinergi dan koordinasi yang harmonis antar Dinas/Instansi pemungut
6. Terjadinya sistem prosedur pendapatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil operasional
7. Tersusunnya sistem prosedur administrasi Pendapatan Daerah yang sesuai dengan Kondisi riil
8. Terwujudnya aparat pendapatan daerah yang sejahtera
9. Terbentuknya motivasi kerja dari pengelolaan pendapatan Daerah.

Kebijakan :

1. Ekstensifikasi berupa mencari sumber-sumber atau objek baru Pendapatan Asli Daerah yang potensial untuk dapat dikembangkan.
2. Intensifikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan menetapkan peraturan-peraturan daerah yang mengatur pemungutan terhadap retribusi daerah berupa tarif pembuatan surat izin usaha industri maupun penjualan, daftar bukti perusahaan, tempat izin surat usaha serta komponen retribusi daerah lainnya.
3. Melakukan kajian terhadap perda-perda penerimaan yang sudah kadaluarsa untuk diperbaharui.
4. Memperbesar penyertaan modal terhadap BUMD yang ada dengan harapan bisa memperoleh bagian laba usaha yang bertambah sejak tahun ke tahun.
5. Melaksanakan penganggaran yang berbasis kapasitas sesuai peraturan yang berlangsung serta pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan anggaran belanja.

PENUTUP

➤ Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pada Derajat Desentralisasi Fiskal, celah rasio PAD terhadap TPD menunjukkan maka rata-rata tahun 2011-2016 kontribusi jumlah Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 14,12%. Keadaan berergantungan Pemerintah Daerah Banjarmasin terhadap Pemerintah Pusat terlalu tinggi sehingga tidak ada kemandirian.
Kemandirian Kemampuan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin jika dilihat dari perhitungan rumus analisis Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin atas Total Pendapatan Daerah tergolong rendah antara 40-50 persen, rata-ratanya tersebut yaitu sebesar 14,12%. Hal ini menunjukkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin masih kurang atau belum mampu diandalkan dalam menunjang pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
2. Kinerja Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dilihat dari :
 - a. Kebutuhan Fiskal Kota Banjarmasin teridentifikasi permasalahan terhadap tingginya kebutuhan fiskal daerah yang pada gilirannya akan berdampak terhadap kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) ini terlihat pada Kebutuhan Fiskal yang meningkat selama periode pengamatan rata-rata Rp. 313.493.023.747, artinya bahwa Kapasitas Fiskal lebih besar di banding Kapasitas Fiskal.
 - b. Untuk Kapasitas Fiskal Kota Banjarmasin rata-rata sebesar Rp.344.725.786.194 sehingga di katakan bahwa Kapasitas Fiskal Kota Banjarmasin termasuk sangat tinggi. Jadi secara umum posisi fiskal Kota Banjarmasin Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam kategori kuat di bandingkan dengan Dana Bagi Hasil.
 - c. Posisi Fiskal Kota Banjarmasin dari dimensi UPAD menunjukkan sudah kuatnya upaya pengumpulan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin selama periode analisis yaitu nilai elastisitasnya lebih dari 1.

Sejalan dengan uraian di atas maka perlu di lakukan untuk Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dapat tetap menaikkan kinerja serta memperbaiki sistem pengumpulan pajak daerah terutama retribusi daerah antara lain : a). Metode menghitung potensi PAD yang efektif, b). Pelaporan hasil pengumpulan PAD perlu dibandingkan serta dimonitor dengan target serta potensi.

3. Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan upaya-upaya yang cukup di antaranya dengan membuat berbagai sasaran, kebijakan, dan program guna terus meningkatkan kemampuan dan kinerja keuangan daerahnya.

➤ **Saran**

Sistem Desentralisasi yaitu memungkinkan suatu keadaan daerah untuk segala potensi yang terbaik secara optimal. Dengan peluang ini maka Pemerintah Daerah Patut semakin proaktif demi mengoptimalkan potensi daerah, menjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat di wilayah ataupun di luar daerah, memanfaatkan segala sumber daya yang ada, membenahi diri agar benar-benar mampu dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Sejalan dengan uraian tujuan di kemukakan saran sebagai berikut :

- a. Upaya pengoptimalan dalam sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan eksistensi kemandirian daerah Kota Banjarmasin, khususnya dalam bidang fiskal. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin harus berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sehingga tidak bergantung lagi dari Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat.
- b. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan PDRB. Jika PDRB meningkat, maka pendapatan perkapita masyarakat meningkat dan akhirnya akan berdampak pada kemampuan masyarakat untuk membayar pajak.
- c. Perusahaan Daerah (BUMD) yang merupakan salah satu sumber pemasok dana ke kas daerah harus lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga nantinya kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat
- d. Bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam mengelola anggaran daerah untuk dapat merencanakan secara matang tentang peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah. Dimana anggaran tersebut lebih memprioritaskan dalam meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Banjarmasin.

Untuk meningkatkan posisi Fiskal dari aspek upaya pengumpulan (UPAD), maka Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin perlu mengoptimalkan pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin memperbaiki sistem pengumpulan pajak dan retribusi daerah, antara lain : 1) Metode menghitung potensi yang efektif, sistematis dan rasional, 2) Pelaporan hasil pengumpulan PAD secara teratur perlu dimonitor dan dibandingkan target dan potensi, 3) Memberikan penghargaan bagi pengelola keuangan daerah yang memiliki integritas yang tinggi, 4) Memberikan insentif pajak, misalnya *local tax holiday* untuk menarik investor serta melakukan kemitraan (*joint venture*).

DAFTAR REFERENSI

Badan Pusat Statistik (BPS), *Banjarmasin Dalam Angka*, Banjarmasin.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Saragih, J. P. (2003). *Desentrralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi* (Pertama ed.).

Indonesia, R. (2004) *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*